



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 08 Oktober 2016

Halaman: 9

Sekda Ikut Awasi Sepak Terjang Pegawai

YOGYA (KR) - Netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di Kota Yogya mendapat pengawasan ekstra dari Panwas Kota Yogya. Sekretaris Daerah (Sekda) Dra RR Titik Sulastri selaku birokrat tertinggi memastikan bawahannya sudah memahami aturan netralitas. Pihaknya pun siap ikut mengawasi sepak terjang pegawainya tersebut.

"Saya pikir, aparatur sipil negara sudah sangat mengerti bahwa mereka harus bersikap netral pada saat Pilwali. Kami pun berkali-kali mengingatkan mengenai netralitas ini setiap kali ada pertemuan," ungkap Titik Sulastri, Jumat (7/10).

Titik memaparkan, aturan mengenai netralitas PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Terutama terkait larangan pegawai untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, terlibat kampanye, menggunakan fasilitas jabatan untuk kegiatan kampanye, serta melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Sementara di lingkungan Pemkot Yogya terdapat sekitar 7.000 PNS. Hanya, tidak semua pegawai adalah warga Kota Yogya yang

memiliki hak pilih dalam Pilwali 2017. "Calon yang akan berpartisipasi juga sudah memahami aturan netralitas aparatur sipil negara. Selain akan dipantau intensif oleh Panwas, kami secara internal juga melakukan hal sama melalui Inspektorat," imbuhnya.

Ketua Panwas Kota Yogya, Agus Muhammad Yasin, menjelaskan kerawanan terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam ajang Pilwali Yogya diakuinya cukup tinggi. Hal ini karena dua kandidat yang akan berlaga merupakan petahana serta memiliki pengaruh terhadap PNS di Pemkot Yogya.

Kendati belum ada penetapan pasangan calon oleh KPU Kota Yogya, namun sudah hampir pasti kedua pasangan akan ditetapkan. "Jangan sampai ada mobilisasi PNS. Sehingga sejak saat ini kami tekankan upa-

ya pencegahan supaya pelanggaran netralitas PNS tidak sampai terjadi," jelasnya.

Oleh karena itu, panwas turut meng-
gandeng Kantor Kesatuan Bangsa guna membantu sosialisasi mengenai hal tersebut. Sejumlah poster imbauan netralitas PNS juga akan dipajang hingga tingkat wilayah. Selain itu, masyarakat juga dituntut aktif menjadi agen pengawasan serta bersedia melapor ke Panwas jika menemukan dugaan pelanggaran terkait netralitas tersebut.

Agus menambahkan, belakangan ini pihaknya juga meningkatkan pengawasan mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan pasangan bakal calon kepala daerah. Hal ini agar tidak dimanfaatkan untuk mencuri start kampanye. Pasaunya, sebelum ada penetapan calon maka semua pihak bebas melakukan kegiatan yang bernuansa kampanye.

"Kondisi saat ini masih abu-abu karena belum ada penetapan pasangan calon. Biasanya bahasa yang digunakan adalah sosialisasi, namun perlu tetap diawasi jika sampai ada ajakan untuk mendukung pasangan tertentu," tandasnya. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005